ORIGINAL RESEARCH
published: 18 Oktober 2026
doi: 10.21070/jkmp.v14i2.2129

Tourism Development in Mendelem Village, Pemalang Regency

Pengembangan Pariwisata di Desa Mendelem, Kabupaten Pemalang

Aldi Pramuja, Mei Maemunah*

Universitas AMIKOM, Yogyakarta, Indonesia.

ABSTRACT

General Background: Rural tourism development requires collaboration among government, local communities, and business actors to promote sustainable local economic development. **Specific Background:** In Mendelem Village, Pemalang Regency, Regional Grant Agreement (Perjanjian Hibah Daerah/PHD) No. 050/2192/2018 served as a local government support instrument for improving road access to Taman Rancah Via Ferrata on Mendelem Hill. **Research Gap:** Further investigation is needed into the relationship between infrastructure grant arrangements, the allocation of responsibilities, and the institutional prerequisites for sociopreneurship-based tourism development. **Aims:** This study aims to analyze the collaborative arrangements established in the grant agreement using the *Collaborative governance* framework proposed by Ansell and Gash. It employs a qualitative approach with a descriptive case study design, drawing on document analysis, an interview with the Secretary of Mendelem Village, and a literature review. **Result:** The findings indicate that the grant, valued at IDR 199,801,000, established formal commitments and responsibilities concerning asset utilization and maintenance. The interview revealed that road improvements were prioritized because the existing access route was damaged and difficult to traverse. However, evidence regarding multi-stakeholder dialogue, trust-building, shared understanding, and socioeconomic impacts remains limited. **Novelty:** The novelty of this study lies in distinguishing between documented administrative commitments and collaborative processes that require empirical verification. **Implications:** Transparent post-grant reporting, a clear allocation of maintenance responsibilities, and inclusive coordination are necessary to support sustainable, community-based tourism development.

Keywords: infrastructure grants, tourism accessibility, local institutions, sustainable development

OPEN ACCESS
ISSN 2338-445X (online)
ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:
Hendra Sukmana

Reviewed by:
Tri Yuniningsih and Akbar Pandu Dwinugraha

**Correspondence: Aldi Pramuja*
aldipramuja@students.amikom.ac.id

Received:September 14, 2026
Accepted: September 26, 2026
Published: October 18, 2026

Citation:
Pramuja, A., & Maemunah, M. (2026). Tourism Development in Mendelem Village, Pemalang Regency.
JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik). 14:2.
doi: 10.21070/jkmp.v14i2.2129

PENDAHULUAN

Pariwisata perdesaan kerap diposisikan sebagai salah satu jalur diversifikasi ekonomi lokal karena dapat menghubungkan sumber daya alam dan budaya dengan peluang usaha masyarakat. Namun, keberadaan potensi wisata tidak otomatis menghasilkan manfaat sosial-ekonomi. Infrastruktur akses, kapasitas organisasi, kualitas layanan, tata kelola lingkungan, dan kemampuan masyarakat membangun usaha merupakan unsur yang saling berkaitan. Pengembangan destinasi juga melibatkan aktor yang memiliki kewenangan, sumber daya, dan kepentingan berbeda. Oleh sebab itu, keberhasilan pengembangan pariwisata tidak cuku[dinilai dari Pembangunan fisik, tetapi dari bagaimana keputusan dibuat, tanggungjawab

dibagi, serta manfaat dan beban pembangunan dikelola (Prayitno et al., 2025; Reina-Usuga et al., 2024; Roxas et al., 2020)

Konteks Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, menjadi relevan karena dokumen Perjanjian Hibah Daerah Nomor 050/2192/2018 memuat dukungan untuk peningkatan jalan menuju objek wisata Taman Rancah Via Ferrata Bukit Mendelem. Dokumen tersebut menunjukkan adanya kebutuhan koordinasi antara pemerintah kabupaten melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan Pemerintah Desa Mendelem. Akan tetapi, dokumen yang tersedia belum memberikan bukti terukur mengenai kondisi jalan sebelum proyek, stagnasi pembangunan, konflik antaraktor, jumlah kunjungan, ataupun dampak ekonomi setelah hibah. Persoalan spesifik yang dapat ditetapkan secara bertanggung jawab dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab dan tujuan kebijakan diformalkan melalui hibah infrastruktur, serta apa yang dapat dan tidak dapat disimpulkan dari dokumen tersebut mengenai proses kolaborasi.

Konteks tersebut diperkuat oleh penelitian Prameswari mengenai pengembangan wisata Rock Climbing Via Ferrata Taman Rancah. Penelitian tersebut menempatkan Taman Rancah di Dusun Tampol, Desa Mendelem, Kecamatan Belik, dan menggambarkan daya tarik berupa panjat tebing via ferrata serta potensi lain seperti pemandangan alam, area swafoto, outbound, camping, kedai kopi, panggung pertunjukan, dan live music. Penelitian itu juga menyoroti kebutuhan pembenahan akses jalan serta pengembangan fasilitas pendukung. Informasi ini memberi konteks bahwa peningkatan akses merupakan salah satu isu pengembangan destinasi yang telah dicatat dalam kajian terdahulu, meskipun tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tentang dampak hibah tahun 2018 atau kondisi destinasi saat ini (Prameswari et al., 2023).

Pertanyaan ini penting karena intervensi infrastruktur melibatkan dua tahap kebijakan yang berbeda. Tahap pertama ialah penyediaan atau peningkatan aset publik melalui dukungan pemerintah daerah. Tahap kedua ialah pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan aktivitas ekonomi yang bergantung pada aset tersebut. Tahap pertama dapat diatur melalui dokumen hibah, sedangkan tahap kedua menuntut organisasi pengelola, koordinasi lintas aktor, partisipasi warga, dan mekanisme pembagian manfaat. Tanpa pengaturan lanjutan, tersedianya akses jalan belum cukup untuk menjamin destinasi dikelola secara inklusif dan berkelanjutan .

Collaborative governance menawarkan kerangka untuk memahami bagaimana lembaga publik dan aktor nonnegara bekerja bersama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Ansell dan Gash menekankan kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif yang mencakup dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, serta hasil antara. memperluas pembahasan melalui dinamika kolaboratif, tindakan bersama, kapasitas untuk bertindak, dan dampak. Kerangka tersebut menegaskan bahwa kolaborasi bukan sekadar adanya dokumen kerja sama, melainkan proses yang memerlukan interaksi, pembelajaran, dan tindakan yang dapat ditelusuri (Dengah et al., 2026; Setiawan, 2026).

Pada pengembangan pariwisata, tata kelola kolaboratif berhubungan dengan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, organisasi lokal, dan pihak pendukung lain. Penelitian mengenai desa wisata menunjukkan bahwa hubungan antarorganisasi, kepemimpinan lokal, pembagian sumber daya, dan partisipasi komunitas dapat memengaruhi keberlanjutan pengelolaan destinasi (Yasintha, 2020). Studi tentang pengembangan objek wisata di Kabupaten Mojokerto juga menempatkan aksesibilitas, fasilitas layanan, promosi, dan desain kelembagaan sebagai unsur yang perlu dikelola bersama dalam pengembangan destinasi (Hariyoko et al., 2022). Meski demikian, model dan hasil kolaborasi tidak dapat dipindahkan secara langsung dari satu lokasi ke lokasi lain. Setiap kasus perlu dianalisis berdasarkan bukti dan kondisi kelembagaan yang tersedia.

Konsep sociopreneurship menambahkan dimensi tujuan sosial pada kegiatan kewirausahaan. Kegiatan ekonomi tidak hanya diarahkan pada keuntungan, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial, pelibatan kelompok lokal, dan pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab (Trisniati et al., 2022). Dalam konteks desa wisata, prinsip ini dapat diwujudkan melalui kesempatan usaha yang terbuka bagi warga, rantai pasok lokal, layanan wisata yang dikelola komunitas, pelestarian sumber daya, dan mekanisme penggunaan kembali sebagian pendapatan untuk kepentingan bersama. Namun, penelitian ini tidak mengasumsikan bahwa bentuk-bentuk usaha tersebut telah berjalan di Mendelem, sebab dokumen hibah yang ditelaah tidak memberikan data yang cukup untuk memastikannya.

Penelitian terdahulu telah membahas tata kelola kolaboratif dalam pengembangan desa wisata, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan pariwisata, dengan menekankan pentingnya keterhubungan antarpemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat. Namun, keterkaitan antara instrumen hibah infrastruktur, pembagian tanggung jawab formal, dan prasyarat kelembagaan bagi pengembangan pariwisata berbasis sociopreneurship masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks Desa Mendelem. Kesenjangan penelitian ini bukan terletak pada anggapan bahwa kajian mengenai hibah atau desa wisata belum pernah dilakukan, melainkan pada fokus analitis untuk mengidentifikasi mandat formal yang tercantum dalam satu dokumen kebijakan serta menilai batas kemampuan dokumen tersebut dalam menjelaskan proses kolaborasi dan dampak sosial-ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan kolaborasi dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor 050/2192/2018, menganalisis ketentuan di dalamnya berdasarkan dimensi *Collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, serta merumuskan implikasi kelembagaan yang dapat mendukung pengembangan pariwisata berbasis sociopreneurship tanpa melampaui bukti empiris yang tersedia. Kontribusi penelitian ini terletak pada pembedaan secara tegas antara komitmen administratif yang terdokumentasi, proses kolaboratif yang masih memerlukan verifikasi empiris, dan dampak sosial-ekonomi yang belum dapat dipastikan tanpa dukungan data yang memadai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif untuk menganalisis pengaturan kolaborasi dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor 050/2192/2018. Sumber data meliputi data primer berupa wawancara tatap muka dengan Bapak Triyono selaku Sekretaris Desa Mendelem di Balai Desa Mendelem, data dokumenter berupa Perjanjian Hibah Daerah, serta sumber sekunder berupa penelitian Prameswari et al. (2023) tentang pengembangan wisata Taman Rancah. Penelitian terdahulu digunakan untuk memberikan konteks historis mengenai potensi daya tarik wisata, aksesibilitas, dan kebutuhan fasilitas, sekaligus membangun kerangka analisis dan membandingkan temuan penelitian. Wawancara dilakukan untuk memahami latar belakang dan pertimbangan Pemerintah Desa Mendelem dalam memanfaatkan dana hibah, sedangkan analisis dokumen digunakan untuk mengidentifikasi nilai hibah, pihak-pihak yang terlibat, peruntukan bantuan, serta tanggung jawab penerima. Berdasarkan keterangan informan, dana hibah diterima bertepatan dengan selesainya pembangunan objek wisata Taman Rancah, kemudian diprioritaskan untuk membangun atau meningkatkan jalan menuju lokasi karena kondisi akses sebelumnya rusak dan sulit dilalui. Unit analisis penelitian mencakup konteks pengambilan keputusan, hubungan antarpemerintah, dukungan sumber daya, tanggung jawab penerima hibah, dan relevansi infrastruktur terhadap pengembangan pariwisata.

Data dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu membaca dan menelaah dokumen serta keterangan wawancara secara menyeluruh, mengidentifikasi informasi mengenai kondisi jalan sebelum perbaikan, waktu penerimaan hibah, alasan penentuan prioritas pembangunan, aktor dan kewenangannya, peruntukan hibah, serta tanggung jawab penerima, kemudian mengelompokkan temuan berdasarkan dimensi *Collaborative governance* Ansell dan Gash, yang meliputi dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*), pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to the process*), dan pemahaman bersama (*shared understanding*). Literatur digunakan untuk mendukung interpretasi temuan, bukan menggantikan bukti empiris.

Kerangka Ansell dan Gash diposisikan sebagai lensa analitis, bukan sebagai tahapan yang diasumsikan telah terlaksana secara otomatis. Oleh karena itu, keterangan informan mengenai latar belakang keputusan tidak langsung dianggap membuktikan efektivitas seluruh dimensi kolaborasi, sebagaimana peningkatan akses jalan tidak serta-merta menunjukkan peningkatan jumlah wisatawan atau pendapatan masyarakat. Untuk menjaga ketepatan interpretasi, penelitian ini membedakan informasi yang bersumber dari wawancara, ketentuan yang tercantum dalam dokumen, dan analisis penulis. Keterbatasan data serta aspek yang belum dapat diverifikasi secara empiris juga dinyatakan secara terbuka agar kesimpulan tetap proporsional dengan bukti yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pembacaan dokumen Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor 050/2192/2018 menunjukkan adanya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Pemerintah Desa Mendelem dalam peningkatan akses jalan menuju Taman Rancah Via Ferrata Bukit Mendelem dengan nilai hibah sebesar Rp199.801.000. Perjanjian tersebut mengatur tanggung jawab penerima hibah, meliputi penggunaan barang sesuai peruntukan, penyampaian pertanggungjawaban formal dan material, serta pemeliharaan aset setelah serah terima. Berdasarkan wawancara tatap muka dengan Triyono selaku Sekretaris Desa Mendelem di Balai Desa Mendelem, dana hibah tersebut dimanfaatkan untuk membangun atau meningkatkan akses jalan karena pembangunan objek wisata telah selesai, sementara kondisi jalan menuju lokasi masih rusak dan sulit dilalui. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan pemerintah desa berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur pendukung destinasi wisata dan upaya menyelaraskan dukungan sumber daya pemerintah kabupaten dengan prioritas kebutuhan lokal. Relevansi aksesibilitas tersebut juga sejalan dengan kajian Prameswari et al. (2023), yang mengidentifikasi perbaikan jalan sebagai salah satu kebutuhan pengembangan Taman Rancah. Dalam perspektif *Collaborative governance* Ansell dan Gash, informasi tersebut menjadi dasar untuk menelaah kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi dalam hubungan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.

Dokumen dan Konteks Pengaturan Hibah

Hasil pembacaan dokumen menunjukkan bahwa PHD Nomor 050/2192/2018 merupakan instrumen formal yang menghubungkan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan Pemerintah Desa Mendelem dalam proyek peningkatan akses jalan menuju Taman Rancah Via Ferrata Bukit Mendelem. Nilai hibah yang tercantum dalam naskah adalah Rp199.801.000. Secara dokumenter, informasi ini menunjukkan adanya dukungan sumber daya dari tingkat kabupaten untuk infrastruktur yang dikaitkan dengan tujuan pariwisata. Dokumen juga memuat tanggung jawab penerima yang berkaitan dengan penggunaan barang hibah sesuai peruntukan, penyampaian pertanggungjawaban formal dan material, serta pemeliharaan aset setelah serah terima.

Keterangan wawancara tatap muka dengan Bapak Triyono selaku Sekretaris Desa Mendelem di Balai Desa Mendelem memberi konteks penting mengenai latar belakang keputusan tersebut. Menurut informan, penerimaan dana hibah bertepatan dengan selesainya pembangunan objek wisata Taman Rancah. Pada saat yang sama, akses jalan menuju lokasi masih berada dalam kondisi rusak dan sulit dilalui. Pemerintah desa kemudian memutuskan memanfaatkan dana hibah untuk membangun atau meningkatkan jalan menuju objek wisata. Dengan demikian, keputusan penggunaan dana tidak berdiri sendiri sebagai pilihan administratif, tetapi berkaitan dengan kebutuhan praktis yang muncul ketika destinasi wisata telah selesai dibangun sementara akses menuju lokasi masih menjadi kendala.

Temuan wawancara tersebut memperjelas hubungan antara kebutuhan lokal dan dukungan sumber daya dari pemerintah kabupaten. Penyelesaian pembangunan objek wisata menciptakan kebutuhan lanjutan berupa akses yang layak, sedangkan kondisi jalan yang rusak berpotensi menyulitkan mobilitas menuju destinasi. Penggunaan hibah untuk peningkatan jalan dapat dibaca sebagai upaya menyelaraskan dukungan pemerintah daerah dengan kebutuhan infrastruktur yang dipandang prioritas oleh pemerintah desa.

Namun, berdasarkan informasi yang tersedia, analisis ini menjelaskan alasan dan rasionalitas keputusan; belum cukup untuk menyimpulkan besarnya dampak terhadap kunjungan wisatawan, pendapatan warga, atau perkembangan usaha sosial karena indikator hasil tersebut belum disediakan.

Temuan tersebut sejalan dengan konteks yang dilaporkan Prameswari et al., (2023), yang menyebutkan bahwa pengembangan Taman Rancah memerlukan perhatian pada aksesibilitas dan fasilitas pendukung. Dalam bagian simpulannya, Amalia mencatat perlunya pembenahan jalan menuju lokasi demi kenyamanan wisatawan, serta penambahan atau pengembangan fasilitas seperti toilet, tempat ibadah, pusat informasi, pos keamanan, pusat oleh-oleh, area parkir, dan spot foto. Kajian itu juga mengidentifikasi potensi kegiatan wisata seperti outbound dan camping, serta menyebutkan pentingnya pemeriksaan jalur untuk keselamatan,

penyelenggaraan kegiatan, dan penguatan promosi melalui media sosial. Dengan demikian, sumber sekunder tersebut mendukung relevansi akses jalan sebagai salah satu kebutuhan pengembangan destinasi.

Dialog Tatap Muka (*Face-to-Face Dialogue*)

Dalam model Ansell dan Gash (2008), dialog tatap muka merupakan proses interaksi langsung antarpemangku kepentingan untuk membangun pemahaman, mengidentifikasi persoalan, dan menegosiasikan kepentingan. Dimensi ini tidak cukup dibuktikan oleh keberadaan dua nama lembaga dalam sebuah perjanjian. Bukti yang lebih kuat dapat berupa notula rapat, daftar hadir, berita acara konsultasi, catatan negosiasi, atau keterangan informan yang menjelaskan agenda dan proses dialog. PHD yang menjadi sumber utama penelitian ini menunjukkan hubungan formal antara dinas kabupaten dan pemerintah desa, tetapi informasi yang tersedia belum menjelaskan secara rinci bagaimana pertemuan dilakukan, siapa saja yang hadir, bagaimana masalah dirumuskan, atau apakah masyarakat ikut terlibat (Matthoriq et al., 2021).

Keterangan wawancara menunjukkan adanya pertimbangan substantif di balik keputusan penggunaan hibah, yakni kebutuhan memperbaiki akses yang rusak setelah pembangunan objek wisata selesai. Informasi ini membantu menjelaskan konteks komunikasi dan penyelarasan kebutuhan antara dukungan hibah dan prioritas infrastruktur desa. Akan tetapi, satu keterangan mengenai latar belakang keputusan belum cukup untuk merekonstruksi secara lengkap bagaimana dialog antarpihak berlangsung, siapa saja yang terlibat dalam perundingan, atau sejauh mana proses tersebut setara dan partisipatif. Untuk membuktikan aspek-aspek itu, naskah dapat dilengkapi dengan keterangan tentang proses pengajuan, pembahasan, persetujuan, dan penetapan penggunaan hibah apabila informasi tersebut tersedia (Khasanah & Prabowo, 2025).

Jika dibandingkan dengan penelitian desa wisata yang menggunakan wawancara dan observasi, misalnya kajian tentang Nglanggeran, sumber empiris yang beragam memungkinkan peneliti menelusuri hubungan antarorganisasi dan kepentingan para aktor secara lebih langsung. Penelitian berbasis dokumen seperti ini memiliki cakupan yang lebih terbatas, tetapi berguna untuk menilai bagaimana kewajiban dirumuskan secara formal. Perbedaan metode tersebut perlu dinyatakan, bukan disamarkan. Dengan demikian, temuan untuk Mendelem pada dimensi ini adalah adanya kanal koordinasi formal yang tercermin dalam perjanjian, sedangkan kualitas dialog, keterwakilan warga, dan penyelesaian perbedaan kepentingan masih menjadi agenda verifikasi.

Secara praktis, penguatan dimensi dialog dapat dilakukan dengan melembagakan forum koordinasi destinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah desa, kelompok sadar wisata jika tersedia, pelaku usaha, kelompok perempuan, pemuda, dan warga yang terdampak. Forum tersebut perlu memiliki agenda, notula, mekanisme tindak lanjut, dan akses informasi anggaran. Rekomendasi ini bukan pernyataan bahwa forum demikian sudah ada di Mendelem, melainkan implikasi kelembagaan yang dapat dipertimbangkan agar hubungan formal berbasis hibah berkembang menjadi dialog yang berkelanjutan.

Pembangunan Kepercayaan (*Trust Building*)

Pembangunan kepercayaan dalam *Collaborative governance* mengacu pada proses ketika para aktor memperoleh keyakinan bahwa pihak lain akan memenuhi komitmen, bertindak dapat diprediksi, dan tidak memanfaatkan kerja sama secara sepihak. Nilai hibah Rp199.801.000 dalam PHD dapat dibaca sebagai komitmen sumber daya yang diformalkan oleh pemerintah kabupaten. Dalam pengertian administratif, dokumen itu memberikan dasar untuk mengharapkan penggunaan sumber daya sesuai tujuan dan pertanggungjawaban oleh penerima. Namun, penyaluran atau penetapan hibah tidak otomatis membuktikan bahwa kepercayaan sosial telah tumbuh atau bahwa warga menyambut program secara positif.

Untuk menilai kepercayaan secara empiris secara lebih menyeluruh, diperlukan informasi mengenai konsistensi pelaksanaan, keterbukaan informasi, penyelesaian masalah, kepatuhan pada kesepakatan, dan pengalaman berbagai aktor selama proses. Dokumen perjanjian memberi informasi tentang ketentuan formal, sedangkan wawancara dengan Sekretaris Desa memberi konteks mengenai alasan penggunaan hibah. Namun, satu wawancara belum cukup

untuk menyimpulkan bahwa kepercayaan telah terbangun di antara seluruh pihak yang terlibat. Rumusan yang lebih hati-hati adalah bahwa perjanjian menyediakan perangkat formal yang berpotensi mendukung kepercayaan melalui kejelasan kewajiban dan akuntabilitas (Surya et al., 2021).

Kejelasan aturan dapat mengurangi ambiguitas tentang peruntukan aset dan kewajiban penerima. Pada saat yang sama, aturan formal hanya efektif jika dipahami, dipatuhi, dan disertai keterbukaan informasi. Dalam model Ansell dan Gash, pembangunan kepercayaan biasanya merupakan proses bertahap yang berkaitan dengan reputasi, pengalaman kerja sama sebelumnya, dan bukti bahwa pihak lain bersedia menanggung biaya kolaborasi. Karena itu, besarnya hibah bukan ukuran tunggal kepercayaan; nilai dana menunjukkan skala komitmen administratif, sedangkan kepercayaan memerlukan bukti tentang hubungan dan perilaku aktor.

Untuk memperkuat kepercayaan pascahibah, pemerintah desa dapat memublikasikan ringkasan penggunaan aset, jadwal pemeliharaan, laporan kondisi jalan, dan kanal pengaduan. Pemerintah kabupaten dapat memastikan tersedianya dokumentasi pelaksanaan dan evaluasi yang dapat diakses publik sesuai ketentuan yang berlaku. Di tingkat komunitas, pertemuan berkala dapat digunakan untuk membahas manfaat, persoalan akses, keselamatan, dan dampak terhadap lingkungan. Praktik tersebut berpotensi mengubah komitmen tertulis menjadi pengalaman akuntabilitas yang dapat dinilai. Efektivitasnya tetap perlu diuji melalui dokumentasi pelaksanaan dan persepsi para pihak.

Komitmen terhadap Proses (*Commitment to the Process*)

Dimensi komitmen terhadap proses tampak paling jelas dalam materi dokumen yang tersedia karena perjanjian memuat kewajiban penerima hibah. Naskah menyebut tanggung jawab Pemerintah Desa Mendelem untuk menggunakan barang hibah sesuai peruntukan, memberikan pertanggungjawaban secara formal dan material, serta merawat dan memelihara aset setelah serah terima. Ketentuan ini merupakan bukti tekstual tentang pembagian tanggung jawab administratif. Dibandingkan dengan dimensi dialog dan kepercayaan yang memerlukan informasi interaksi, komitmen formal lebih dapat diidentifikasi melalui pembacaan klausul perjanjian.

Meski demikian, komitmen dalam dokumen harus dibedakan dari kepatuhan aktual. Perjanjian menunjukkan kewajiban yang disepakati, bukan bukti bahwa semua kewajiban telah dilaksanakan dengan baik. Untuk menyatakan pelaksanaan yang akuntabel, peneliti memerlukan laporan pertanggungjawaban, berita acara serah terima, dokumen pemeliharaan, bukti inspeksi, atau catatan tindak lanjut. Tanpa sumber tersebut, pernyataan bahwa pengelolaan berjalan berkesinambungan atau aset dirawat secara mandiri akan melampaui data yang tersedia.

Secara konseptual, komitmen terhadap proses penting karena kolaborasi memerlukan kemauan untuk terus terlibat setelah keputusan awal diambil. Ansell dan Gash (2008) menempatkan komitmen sebagai unsur yang dipengaruhi rasa saling memiliki terhadap proses, kepercayaan, dan pemahaman bahwa tujuan bersama hanya dapat dicapai melalui kerja sama. Dalam kasus hibah infrastruktur, komitmen mempunyai aspek administratif dan substantif. Aspek administratif berkaitan dengan kepatuhan terhadap perjanjian; aspek substantif berkaitan dengan tindakan pemeliharaan, koordinasi, dan pemanfaatan aset untuk tujuan publik. Dokumen yang dianalisis secara langsung mendukung aspek pertama sebagai kewajiban, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan pelaksanaan aspek kedua.

Pada pengembangan wisata, komitmen juga perlu menjangkau pengelolaan risiko, keselamatan, kebersihan, perlindungan lingkungan, dan kualitas layanan. Infrastruktur akses menuju destinasi petualangan alam dapat mendukung mobilitas, tetapi pengelolaan destinasi membutuhkan standar operasional dan koordinasi yang melampaui pembangunan jalan. Oleh karena itu, perlu ada keterhubungan antara kewajiban pemeliharaan aset dengan rencana pengelolaan destinasi yang lebih menyeluruh. Jika kelembagaan pengelola belum diformalkan, tanggung jawab dapat menjadi kabur ketika terjadi pergantian pengurus atau ketika dukungan proyek berakhir.

Dalam kerangka sociopreneurship, komitmen proses seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan administrasi hibah. Keberlanjutan usaha sosial membutuhkan misi sosial yang jelas, mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif, transparansi pendapatan dan biaya, serta kesepakatan mengenai penggunaan surplus bagi manfaat komunitas. Literatur social entrepreneurship menjelaskan bahwa nilai sosial merupakan tujuan inti, sementara kegiatan

ekonomi menjadi sarana untuk mempertahankan dan memperluas manfaat (Tamrin & Raharja, 2021). Namun, PHD yang dikaji berfokus pada infrastruktur sehingga belum dapat dijadikan bukti adanya model usaha sosial, badan usaha milik desa yang terlibat, atau mekanisme distribusi keuntungan di Mendelem.

Implikasi praktisnya ialah perlunya pengaturan pascahibah yang lebih operasional. Pemerintah desa bersama pihak terkait dapat menyusun rencana pemeliharaan aset, menetapkan penanggung jawab, mengatur pembiayaan, serta mengintegrasikan akses jalan ke dalam rencana pengelolaan destinasi. Jika kegiatan usaha sosial dikembangkan, bentuk kelembagaan dan dasar hukumnya perlu dipilih sesuai kondisi aktual dan ketentuan yang berlaku. Penetapan BUMDesa, kelompok pengelola, atau badan lain tidak boleh dilakukan hanya sebagai label; perlu ada mandat, aturan internal, mekanisme pertanggungjawaban, dan ruang partisipasi masyarakat. Rekomendasi ini menjawab kebutuhan keberlanjutan, bukan klaim bahwa struktur tersebut sudah ada (Akbar et al., 2022).

Analisis Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*) dan Hubungannya dengan *Sociopreneurship*

Pemahaman bersama merujuk pada kesepahaman mengenai masalah yang dihadapi, tujuan yang ingin dicapai, serta makna tindakan kolaboratif bagi para pihak. Dalam konteks PHD, tujuan yang dapat dibaca dari dokumen ialah peningkatan akses jalan menuju objek wisata. Tujuan tersebut menyediakan titik temu administratif antara dukungan pemerintah kabupaten dan tanggung jawab pemerintah desa. Akan tetapi, dokumen tidak memuat bukti bahwa seluruh aktor memiliki pemahaman yang sama tentang strategi pengembangan wisata, prioritas sosial, pembagian manfaat, atau bentuk kewirausahaan sosial yang hendak dikembangkan.

Dengan demikian, hubungan antara peningkatan jalan dan sociopreneurship perlu dirumuskan sebagai hubungan potensial, bukan hasil yang sudah terbukti. Akses yang lebih baik secara teoritis dapat memperbaiki keterhubungan destinasi dengan pengunjung, pemasok, dan layanan lokal. Namun, konversi aksesibilitas menjadi manfaat sosial-ekonomi bergantung pada faktor lain, termasuk daya tarik produk wisata, promosi, keamanan, kapasitas pelaku usaha, kualitas pelayanan, tata kelola lingkungan, dan akses warga terhadap peluang ekonomi. Tanpa data tentang faktor-faktor tersebut, tidak dapat dipastikan bahwa jalan yang ditingkatkan telah meningkatkan arus wisatawan atau pendapatan masyarakat.

Sociopreneurship dapat dipahami sebagai aktivitas kewirausahaan yang menempatkan penciptaan nilai sosial sebagai tujuan penting. Dalam pariwisata perdesaan, prinsip tersebut dapat diterjemahkan menjadi peluang usaha yang melibatkan warga lokal, pemanfaatan produk lokal, pekerjaan yang layak, pelestarian budaya dan alam, serta reinvestasi sebagian manfaat ekonomi untuk kebutuhan komunitas. Konsep ini berbeda dari pertumbuhan usaha semata: peningkatan omzet sebuah usaha belum tentu menghasilkan pemerataan sosial, sedangkan program pemberdayaan yang tidak memiliki model ekonomi berkelanjutan mungkin sulit bertahan. Karena itu, sociopreneurship memerlukan keseimbangan antara kelayakan ekonomi dan misi sosial.

PHD yang ditelaah dapat dipandang sebagai salah satu kondisi pemungkin bagi ekosistem tersebut karena menyediakan dasar formal bagi dukungan infrastruktur. Namun, dokumen tidak menunjukkan adanya rencana bisnis sosial, mekanisme penyerapan tenaga kerja lokal, aturan kemitraan dengan pemasok, sistem pembagian pendapatan, atau indikator manfaat bagi kelompok rentan. Karena itu, integrasi sociopreneurship dalam artikel ini berada pada tingkat implikasi kebijakan dan kerangka analitis, bukan deskripsi praktik usaha yang telah terverifikasi. Perbedaan ini penting agar konsep tidak digunakan hanya sebagai istilah promosi tanpa bukti kelembagaan.

Literatur kewirausahaan sosial menekankan bahwa penciptaan nilai sosial perlu melekat pada misi dan model organisasi, bukan sekadar menjadi dampak sampingan dari kegiatan komersial Hasanah et al. (2022) juga menunjukkan pentingnya usaha berbasis komunitas yang menempatkan sumber daya sosial dan budaya lokal sebagai bagian dari pengembangan ekonomi. Dalam pengembangan destinasi, hal ini berarti masyarakat perlu memiliki peran yang nyata dalam perencanaan dan pengelolaan, bukan hanya menjadi penerima manfaat yang diasumsikan. Penelitian lanjutan di Mendelem perlu menelusuri apakah dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dijalankan oleh kelompok pengelola dan pelaku usaha setempat.

Perbandingan dengan studi pariwisata berbasis komunitas menunjukkan bahwa tata kelola destinasi yang berkelanjutan memerlukan proses yang lebih luas daripada pembangunan

akses. Kajian tentang Nglanggeran, misalnya, membahas kolaborasi antarorganisasi dan peran berbagai pihak dalam membangun pariwisata perdesaan. Kajian tata kelola pariwisata juga menekankan hubungan antara struktur institusi, partisipasi, keberlanjutan, dan distribusi manfaat (Supriandi & Priyana, 2023). Temuan dari lokasi lain tidak dapat dianggap sebagai bukti tentang Mendelem, tetapi dapat digunakan sebagai pembanding konseptual untuk merumuskan indikator yang sebaiknya diperiksa.

Untuk menjadikan pemahaman bersama lebih operasional, para aktor dapat menyepakati visi destinasi, kelompok sasaran manfaat, standar lingkungan dan keselamatan, serta indikator kinerja sosial-ekonomi. Indikator dapat mencakup jumlah usaha lokal yang terlibat, proporsi tenaga kerja warga desa, nilai belanja wisata yang terserap secara lokal, partisipasi kelompok perempuan dan pemuda, kontribusi untuk pemeliharaan lingkungan, serta kepuasan masyarakat. Pengumpulan indikator tersebut perlu memiliki data dasar dan dilakukan secara berkala. Usulan ini bukan pengganti bukti yang belum tersedia, melainkan rancangan evaluasi agar klaim keberhasilan di masa mendatang dapat diuji.

Batas Kolaborasi Formal dan Agenda Penguatan Kelembagaan

Keempat dimensi di atas menunjukkan bahwa bukti yang paling kuat dalam dokumen adalah komitmen formal dan pembagian tanggung jawab, sementara kualitas dialog, tingkat kepercayaan, serta pemahaman bersama memerlukan sumber tambahan. Pembacaan ini tidak berarti kolaborasi tidak terjadi, tetapi bahwa satu dokumen perjanjian hanya memungkinkan kesimpulan terbatas. Secara metodologis, perbedaan antara "tidak terdokumentasi dalam sumber yang dianalisis" dan "tidak terjadi" harus dijaga. Penelitian ini tidak menemukan bukti dalam dokumen yang cukup untuk memverifikasi interaksi informal atau hasil ekonomi, sehingga aspek tersebut dinyatakan belum dapat ditentukan.

Secara substantif, perjanjian hibah menyediakan landasan administratif untuk menghubungkan dukungan kabupaten dan tanggung jawab desa. Landasan ini penting karena aset publik membutuhkan penanggung jawab dan aturan penggunaan. Akan tetapi, *Collaborative governance* dalam pengertian teoretis memerlukan lebih dari hubungan pemberi dan penerima hibah. Ia menuntut proses yang memungkinkan para pihak merumuskan tujuan, berbagi pengetahuan, mengelola perbedaan, dan memantau hasil. Oleh karena itu, istilah "kolaborasi" dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaturan formal yang tampak pada dokumen, bukan sebagai penilaian menyeluruh atas kualitas keseluruhan proses tata kelola di Mendelem.

Agenda penguatan kelembagaan pascahibah setidaknya mencakup empat hal. Pertama, memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan jalan dan bagaimana kebutuhan pembiayaan dianggarkan. Kedua, membangun mekanisme koordinasi yang terdokumentasi, termasuk rapat berkala, catatan keputusan, dan tindak lanjut. Ketiga, menyusun rencana pengelolaan destinasi yang menghubungkan infrastruktur, keselamatan, lingkungan, layanan, promosi, dan partisipasi warga. Keempat, apabila usaha sosial menjadi arah pengembangan, memformalkan model kelembagaan dan mekanisme akuntabilitasnya agar tujuan sosial tidak hanya bergantung pada individu atau proyek jangka pendek.

Penguatan kelembagaan perlu diikuti evaluasi yang berbasis indikator. Untuk menguji apakah intervensi infrastruktur berhubungan dengan perubahan ekonomi, data dapat dikumpulkan pada beberapa periode, disertai penjelasan mengenai faktor lain yang mungkin memengaruhi hasil. Data yang relevan meliputi jumlah kunjungan, lama tinggal, pengeluaran pengunjung, jumlah dan jenis usaha lokal, pendapatan pelaku usaha yang bersedia berpartisipasi, kesempatan kerja, kontribusi pemeliharaan, serta persepsi warga terhadap pembagian manfaat. Data tersebut sebaiknya tidak hanya berupa agregat, tetapi juga memperhatikan siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya sosial atau lingkungan (Rokhimah et al., 2025).

KESIMPULAN

Perjanjian Hibah Daerah Nomor 050/2192/2018 senilai Rp199.801.000 menjadi dasar administratif peningkatan akses jalan menuju Taman Rancah Via Ferrata Bukit Mendelem, termasuk pengaturan penggunaan, pertanggungjawaban, dan pemeliharaan aset. Namun, bukti mengenai dialog multipihak, kepercayaan, pemahaman bersama, dan dampak ekonomi hibah masih terbatas sehingga efektivitas tata kelola kolaboratif dan sociopreneurship belum dapat dipastikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan desa perlu memperkuat koordinasi, transparansi pelaporan, pemeliharaan aset, serta pelibatan masyarakat dan pelaku usaha. Penelitian selanjutnya perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan data sosial-ekonomi untuk menilai proses kolaborasi serta dampak hibah secara lebih komprehensif.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis menyatakan bahwa artikel ini merupakan hasil karya sendiri dan, sepanjang pengetahuan penulis, tidak memuat materi yang sebelumnya telah diterbitkan atau ditulis oleh orang lain, maupun bagian substansial dari materi yang telah diterima untuk diterbitkan dalam publikasi lain, kecuali jika sumbernya telah diakui dan dicantumkan secara jelas dalam artikel ini. Setiap kontribusi yang diberikan oleh pihak lain dalam penelitian ini, termasuk mereka yang bekerja sama dengan penulis, telah diakui secara eksplisit dalam artikel ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Medalem. Penulis juga mengakui penggunaan ChatGPT (OpenAI) untuk membantu penyuntingan bahasa dan kejelasan naskah. Seluruh keluaran AI telah diverifikasi, dan penulis bertanggung jawab penuh atas keakuratan serta integritas karya yang dipublikasikan.

REFERENCES

Akbar, R., Supriyono, B., & Domai, T. (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, *8*(2), 170–177. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.02.5

Dengah, A. M., Pati, A., & Lengkong, J. (2026). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Potensi Wilayah Lokal Di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, *13*(9). https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i9.1283

Hariyoko, Y., Biadi, E. P., & Susiantoro, A. (2022). Pengembangan Objek Wisata Kabupaten Mojokerto Dengan Pendekatan Collaborative Governance (Studi Kasus Pemandian Air Panas Pacet). *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, *11*(1), 1–10. https://doi.org/10.38156/gjkmp.v11i1.80

Hasanah, B., Sururi, A., Prananda, D. P., & Noval, A. M. (2022). Kewirausahaan Sosial: Partisipasi Masyarakat Dan Evaluasi Dampak Sosial-Ekonomi. *Jurnal Administrasi Negara*, *28*(3), 291–317. https://doi.org/10.33509/jan.v28i3.1721

Khasanah, L. N., & Prabowo, B. S. (2025). Integrasi Prinsip SDGs dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Kearifan Lokal. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *3*(1), 37–46. https://doi.org/10.70716/perseptif.v3i1.432

Matthoriq, M., Zauhar, S., & Hermawan, R. (2021). Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata-Desa "Bumiaji Agrotourism" di Kota Wisata Batu). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, *007*(01), 20–29. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.01.3

Prameswari, M. W., Jacob Ganef Pah, & Odang Permana. (2023). Risk Management In Via Ferrata Cliff Climbing Tourism Activities In Mount Mendelem, Pemalang Regency. *International Journal of Sustainable Competitiveness on Tourism*, *2*(01), 44–52. https://doi.org/10.34013/ijscot.v2i01.1273

Prayitno, G., Fikriyah, F., Rahmawati, R., Dinanti, D., Nisak, F. F., Wijayati, W. P., & Nugraha, A. T. (2025). Does governance matter? Social pathways from reciprocity to sustainable tourism in rural Java, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, *11*(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2572348

Reina-Usuga, L., Camino, F., Gomez-Casero, G., & Jara Alba, C. A. (2024). Rural tourism initiatives and their relationship to collaborative governance and perceived value: A review of recent research and trends. *Journal of Destination Marketing & Management*, *34*, 100926. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2024.100926

Rokhimah, Kahinah, D. I., & Afandi, I. N. (2025). Transformasi Sosial Ekonomi Remaja Kampung Maibo Melalui Pelatihan Kerajinan Tangan dan Wirausaha Kreatif Berbasis Eco-Friendly. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(2), 868–884. https://doi.org/10.30640/abdimas45.v4i2.5328

Roxas, F. M. Y., Rivera, J. P. R., & Gutierrez, E. L. M. (2020). Mapping stakeholders' roles in governing sustainable tourism destinations. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, *45*, 387–398. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.09.005

Setiawan, M. R. Y. (2026). Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Belajar Taman Pelangi Kenjeran. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, *13*(9), 261–271. https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i9.1261

Supriandi, S., & Priyana, Y. (2023). Faktor-faktor yang Mendorong Kesuksesan Kewirausahaan Sosial dalam Menyelesaikan Masalah Lingkungan. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, *1*(04). https://doi.org/10.58812/jekws.v1i04.714

Surya, I., Nofrima, S., Saputra, H. A., & Nurmiyati, N. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus: Wisata Kebun Teh Nglinggo). *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, *6*(2), 190. https://doi.org/10.29300/imr.v6i2.2605

Tamrin, M. H., & Raharja, W. T. (2021). Local Participation in the Development of Klayar Beach Tourism in Pacitan Regency. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, *9*(2), 56–63. https://doi.org/10.21070/jkmp.v9i2.1576

Trisniati, E., Cadith, J., & Sapto Nugroho, K. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. *Jurnal Governansi*, *8*(1), 59–68. https://doi.org/10.30997/jgs.v8i1.4379

Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, *4*(1), 1. https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright ©2026 Aldi Pramuja, Mei Maemunah. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.